

# REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK: TANTANGAN DAN STRATEGINYA MENUJU GOOD GOVERNANCE

Kandung Sapto Nugroho

### Abstrak:

Reformasi/perubahan bukanlah sebuah hal yang tabu, tinggal bagaimana mengemas perubahan menjadi hal yang positif. Dampak dari penerapan otonomi daerah di berbagai daerah, ada yang berdampak positif tapi banyak pula dampak negatifnya. Kabupaten Jembrana, Sragen, Solok, Lebak adalah gambaran dari keberhasilan penerapan otonomi daerah secara benar. Provinsi Banten yang bermisi, "Mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Government*) yang didukung oleh penegakan supremasi hukum", nampaknya masih diawang-awang, karena hasil penelitian PSKK UGM tahun 2006 menunjukkan bahwa tingkat transparansi di Provinsi Banten adalah yang paling rendah yakni 0,33, dimana transparansi adalah salah satu prinsip pokok dari *good governance*. Tantangan mewujudkan *good governance* diantaranya adalah menciptakan kemampuan memahami *socio cultural* wilayahnya, memahami transparansi dan akuntabilitas, *political will* dari pemimpin, menciptakan masyarakat yang aspiratif, membangun *continous improvement* dari semua stakeholders dalam mewujudkan *good governance*. Strategi yang bisa capai adalah dengan membangun akuntabilitas publik, iklim usaha yang kondusif, *law enforcement* dan *rule of law*, kejelasan pembagian kewenangan pusat dan daerah, inovasi, kerjasama antar pemerintah daerah dan restrukturisasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pelayanan yang prima menuju tercapainya tata pemerintahan yang baik.

**Kata Kunci:** Reformasi, Strategi, *Good Governance*

## Pendahuluan

Permasalahan birokrasi yang ada di Indonesia sangat kompleks adanya mulai dari masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, birokrasi yang berbelit-belit dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan bukti konkrit *bad practice* dari kinerja birokrasi Indonesia. Permasalahan ini harus dilihat dari dua sudut pandang dari birokrasi itu sendiri. *Pertama*, faktor internal berupa demokratisasi, sentralisasi, resentralisasi, desentralisasi dari birokrasi itu sendiri, artinya kemauan untuk merubah diri dari birokrasi akan sangat signifikan mempengaruhi kinerja birokrasi. *Kedua*, faktor eksternal berupa era globalisasi dan teknologi informasi juga berpengaruh pada penentuan alternatif pilihan kerja birokrasi.

Secara langsung atau tidak langsung faktor-faktor tersebut diatas sangat mempengaruhi kinerja birokrasi di Indonesia baik berupa transparansi, akuntabilitas, *law enforcement*, pelimpahan tanggung jawab dan kewenangan, profesionalitas yang kesemuanya itu adalah prinsip-prinsip dari *good governance*. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan perbaikan kinerja birokrasi semakin kuat, karena itulah birokrasi pemerintahan Indonesia harus melakukan sebuah reformasi sistem birokrasi yang komprehensif.

Sejumlah pemicu buruknya permasalahan birokrasi publik di Indonesia adalah: disiplin kerja, penyalahgunaan kewenangan, KKN, rendahnya kualitas SDM, sistemnya tidak efektif, sarana dan prasarana yang kurang memadai; buruknya efisiensi dan efektifitas kerja, rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya gaji PNS, dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

Globalisasi dan era teknologi informasi akan semakin mendorong tuntutan masyarakat pada birokrasi pemerintahan, birokrasi harus bisa menjadikan teknologi sebagai pendorong berkualitasnya pelayanan, bukan sebagai penghambat dari proses pelayanan. Birokrasi harus bisa menciptakan masyarakat digital (*digital society*) sebagai akibat perkembangan jaman yang sangat cepat.

Buruknya kerja birokrasi di Indonesia tidak bisa sepenuhnya kita bebankan pada birokrasi itu sendiri, namun semua *stakeholders* ikut bertanggungjawab, misalnya terjadinya praktek KKN pasti melibatkan keduabelah pihak, ada yang disuap dan ada yang menyuap. Ini akan menjadi sebuah lingkaran setan yang sulit diberantas jikalau reformasi birokrasi hanya melibatkan salah satu pihak, oleh karena itu semua *stakeholders* harus bersatu padu untuk membentuk budaya birokrasi menuju tercapainya *good governance*, yakni terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat.

Fakta bahwa masyarakat kurang mampu/miskin pada tahun 2004 mencapai 16,6 % dari total penduduk Indonesia, yang berarti sekitar 36,1 juta jiwa. Pada tahun berikutnya jumlah penduduk miskin justru bertambah menjadi lebih dari 39 juta jiwa adalah orang miskin akan menjadi sebuah faktor yang signifikan untuk menjadi kajian pokok bagi pemerintah, bagaimana memberikan pelayanan yang baik, modelnya seperti apa, yakni sebuah pelayanan yang berbasis pada rakyat miskin bukan pelayanan yang berbasis bisnis yang mengarah privatisasi. Semakin meningkatnya orang miskin dari tahun ke tahun adalah bukti nyata kegagalan birokrasi. Karena masyarakat miskin semakin tidak mempunyai kemampuan untuk mengakses layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan informasi, layanan perumahan, layanan transportasi dan lain sebagainya karena tidak mempunyai daya beli yang memadai.

Pelayanan di bidang pendidikan, pada tahun 2003 rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 7,1 tahun dan proporsi penduduk berusia 10 tahun keatas yang berpendidikan SLTP keatas masih sekitar 36,2 persen. Sementara itu angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas masih sebesar 10,12 persen. Pada saat yang sama Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun sudah mencapai 96,4 persen, tetapi sayangnya untuk usia 13-15 tahun hanya 81,0 persen, lebih parah lagi usia 16-18 tahun hanya 50,97 persen.

Data Human Development Report 2004 mengungkapkan bahwa tahun 1999-2001 Indonesia hanya mengalokasikan anggaran pemerintah sebesar 1,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara dalam kurun waktu yang sama Malaysia, Thailand, dan Filipina secara berturut-turut telah mengalokasikan anggaran sebesar 7,9 persen, 5,0 persen, dan 3,2 persen dari PDB.

Pada tahun 2004 sekitar 57,2 persen gedung SD/MI dan sekitar 27,3 persen gedung SMP/MTs mengalami rusak ringan dan rusak berat. Hal tersebut selain berpengaruh pada ketidaklayakan dan ketidaknyamanan proses belajar mengajar juga berdampak pada keengganan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah tersebut. Pada saat yang sama masih banyak pula peserta didik yang tidak memiliki buku pelajaran. Kecenderungan sekolah untuk mengganti buku setiap tahun ajaran baru selain semakin memberatkan orangtua juga menyebabkan inefisiensi karena buku-buku yang dimiliki sekolah tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh siswa.

Indonesia telah mengalami kemajuan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan penduduk. Data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan angka kematian bayi menurun dari 46 (SDKI 1997) menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003) dan angka kematian ibu melahirkan menurun dari 334 (SDKI 1997) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003). Umur harapan hidup meningkat dari 65,8 tahun (Susenas 1999) menjadi 66,2 tahun (Susenas 2003).

Tetapi, Pada tahun 2002, rata-rata setiap 100.000 penduduk baru dapat dilayani oleh 3,5 puskesmas. Selain jumlahnya yang kurang, kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan di puskesmas masih menjadi kendala. Pada tahun 2003 terdapat 1.179 Rumah Sakit (RS), terdiri dari 598 RS milik pemerintah dan 581 RS milik swasta. Jumlah seluruh tempat tidur (TT) di RS sebanyak 127.217 TT atau rata-rata 61 TT melayani 100.000 penduduk. Walaupun rumah sakit terdapat di hampir semua kabupaten/kota, namun kualitas pelayanan sebagian besar RS pada umumnya masih di bawah standar. Pelayanan kesehatan rujukan belum optimal dan belum

memenuhi harapan masyarakat. Masyarakat merasa kurang puas dengan mutu pelayanan rumah sakit dan puskesmas, karena lambatnya pelayanan, kesulitan administrasi dan lamanya waktu tunggu. Perlindungan masyarakat di bidang obat dan makanan masih rendah. Dalam era perdagangan bebas, kondisi kesehatan masyarakat semakin rentan akibat meningkatnya kemungkinan konsumsi obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, ini menunjukkan rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan.

Sebagai dampak penerapan otonomi daerah, di beberapa daerah mengalami dampak negatif, namun ada pula yang mengalami kemajuan yang pesat dalam hal birokrasi pelayanan publik, seperti Kabupaten Jember, Kabupaten Solok, Kabupaten Sragen, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Lebak adalah bukti keberhasilan birokrasi daerah menerapkan otonomi daerah sehingga birokrasi pelayanan publik pun menjadi lebih baik.

Pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Solok memperbaharui bidang pendidikan dengan melakukan peningkatan anggaran pendidikan sebesar 15,4 % angka ini lebih besar dari apa yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk tahun 2006 yakni 13,1 %. Anggaran ini dialokasikan pada pengadaan buku untuk anak keluarga miskin, perpustakaan & laboratorium bahasa terpadu di kecamatan-kecamatan, penggadaan harta pusaka untuk biaya pendidikan, *reward* untuk tokoh/masyarakat yang membantu tuntas wajib belajar 9 tahun dan pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan, rehabilitasi gedung sekolah dasar.

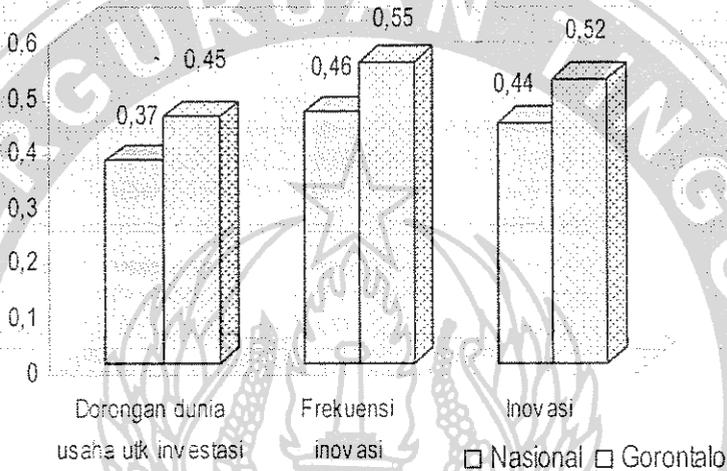
Bidang kesehatan pemerintah Kabupaten Solok mengalokasikan anggaran sebesar 8 %, berobat gratis bagi KK miskin, pemerataan tenaga kesehatan, tunjangan daerah lebih bagi petugas di daerah terisolir, peningkatan peran pimpinan puskesmas untuk efisiensi, efektivitas dan pelayanan kesehatan serta persiapan pembangunan RSUD. Secara umum Propinsi Sumatra Barat tingkat kemiskinannya mencapai sebesar 29,8 %, kualitas kesehatan anak terbagi ke dalam

dua hal yakni balita kurang gizi sebesar 12 % dan kasus gizi buruk sebesar 3,9 %.

Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan revitalisasi posyandu, untuk mengaktifkan kembali dan melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya *empowering*, pembentukan posyandu lansia, pemberian pengobatan gratis kepada pemilik askeskin dan mempermudah pelayanannya, meningkatkan peralatan sarana dan prasarana yang lebih canggih untuk rumah sakit sehingga diharapkan harapan hidup menjadi lebih lama, dan mempermudah perizinan untuk menarik minat investor.

Transparansi, pengendalian korupsi dan penegakan hukum atau *law enforcement* menjadi pemikiran bersama para stakeholders yang berperan di Kabupaten Solok, bahkan Propinsi Sumatra Barat sebagai percontohan pemberantasan korupsi yang melibatkan 33 dari 43 anggota DPRD untuk periode 1999 - 2004 dan telah divonis bersalah.

Hasil penelitian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM tahun 2006 yang menggunakan sampel para birokrat, pengusaha, dan *civil society* secara berimbang, menunjukkan bahwa dalam hal efektifitas pelayanan seperti ketersediaan pelayanan, akses pelayanan dan kapasitas pemerintah menunjukkan bahwa indeks efektifitas Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebesar 0,54 ini berarti lebih baik dari efektifitas pemerintahan secara nasional yang hanya 0,49. Dalam hal kemampuan pemerintah daerah melakukan dorongan pada dunia usaha untuk melakukan investasi di Kabupaten Gorontalo sebesar 0,45 sedangkan kemampuan secara nasional adalah 0,37, kemudian kemampuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam hal frekuensi sering tidaknya melakukan inovasi adalah sebesar 0,55 sedangkan kemampuan secara nasional adalah 0,46. Kemudian kemampuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam melakukan inovasi itu sendiri adalah sebesar 0,52 sedangkan kemampuan secara nasional sebesar 0,44. Untuk lebih jelas perhatikanlah Gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. Indeks Inovasi Kabupaten Gorontalo

Contoh kabupaten lain yang telah berhasil menerapkan otonomi daerah adalah Kabupaten Jembrana yang melakukan banyak hal dalam pemerintahannya, diantaranya adalah membuat pelayanan perijinan satu pintu dan satu atap dengan prosedur, biaya, waktu dan standar yang jelas, Pemerintah Kabupaten Jembrana juga memberikan subsidi dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran sehingga dapat diberikan secara gratis lebih lagi setiap bulannya dilakukan pengundian 15 hadiah, dengan hadiah utamanya sebuah sepeda motor. Disamping itu penduduk yang berKTP Jembrana akan mendapatkan asuransi kematian sebesar Rp. 1.000.000,- per orang di samping itu masyarakat umum disediakan sebuah panggung hiburan yang pelaksanaannya dilakukan dua kali dalam satu bulan di tiap-tiap kecamatan.

Dalam hal program pengentasan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Jembrana melakukan langkah dengan mengurangi beban masyarakat melalui program peningkatan pelayanan publik, selanjutnya dengan meningkatkan *Daya Beli* masyarakat melalui Pemberdayaan Keluarga dan Kelompok Masyarakat dan Perluasan Kesempatan Kerja. Menanggapi adanya pengaduan dari masyarakat Pemerintah Kabupaten Jembrana membentuk Pusat Informasi dan Pengaduan Jembrana (PIPJ) yang pelaksanaannya berupa *SMS Centre* dan *Call Centre*.

Pemerintah Kabupaten Jembrana melakukan perampingan organisasi dari yang semula berdasarkan struktur organisasi pemerintah Kabupaten Jembrana Perda No. 7, 8, 9 JO PP No. 84 Tahun 2000 terdiri dari

1. Sekretariat
2. Sekretariat Dewan
3. Bawasda
4. Bappeda
5. Dinas Diknas
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas PU
8. Dinas Perindag
9. Dinas Peternakan
10. Dinas Pertanian
11. Dinas Koperasi
12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
13. Dinas Perikanan dan Kelautan
14. Kantor Dafduk, BLK
15. Kantor Perhubungan
16. Kantor Pariwisata
17. Kantor LHKP
18. Kantor Infokom
19. Kantor PMD
20. Kantor Kesos
21. Kantor Pol PP Kesbanglinmas
22. Kantor Pendapatan

23. Camat
24. Lurah
25. Cabang Dinas

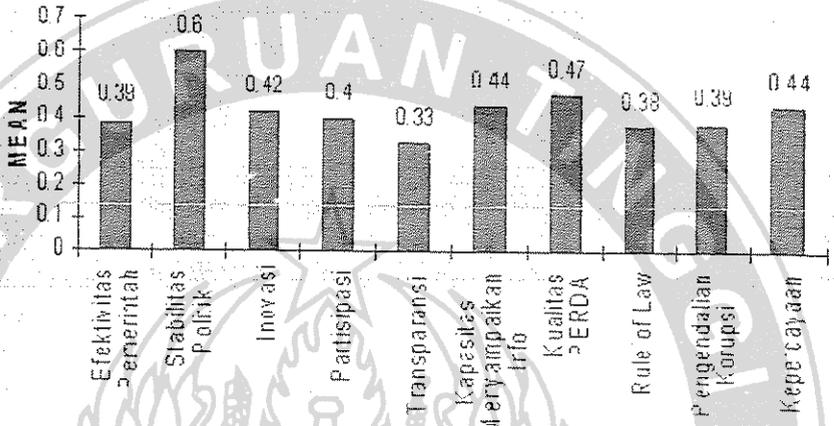
Kemudian struktur organisasi pemerintah Kabupaten Jembrana diubah melalui Perda No. 10 JO PP No. 8 Tahun 2003 terdiri dari :

1. Sekretariat daerah
2. Sekretariat Dewan
3. Bawasda
4. Bappeda
5. Dinas Dikbudpar
6. Dinas Kes & Kesoja
7. Dinas PU & LH
8. Dinas Perindag Kop
9. Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan
10. Dinas Naker Dutakencana
11. Dinas Inkomyanumhub
12. Kantor Pol PP Kesbanglinmas
13. Kantor Diklat Daerah
14. Camat
15. Lurah

### **Bagaimanakah dengan kondisi Pemerintah Provinsi Banten ?**

Banten dengan Visi "Iman dan taqwa, landasan pembangunan menuju Banten mandiri, maju dan sejahtera" dan 8 butir Misi dimana pada butir kedua berbunyi "Mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Government*) yang didukung oleh penegakan supremasi hukum", nampaknya ingin mencapai tata pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih. Setelah 5 tahun pemerintahan Provinsi Banten hasil yang dicapai masih jauh dari yang diharapkan.

Hasil penelitian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Tahun 2006 menunjukkan bahwa kondisi Pemerintah Provinsi Banten menurut *stakeholders* tergambar dalam gambar berikut ini :



Gambar. Profil Pemerintah Provinsi Banten

Terlihat jelas masalah utama yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Banten adalah indikator transparansi yakni hanya sebesar 0,33. Ini harus diperhatikan oleh semua *stakeholders*, karena membangun transparansi harus melibatkan semua unsur dalam masyarakat. Akan menjadi lebih baik bila Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka menerapkan salah satu prinsip *good governance* yakni transparansi dengan membuat sebuah peraturan daerah, sehingga mendukung tercapainya tata pemerintahan yang baik. Pemerintah Kabupaten Lebak sudah memperdakan tentang transparansi ini, yakni dengan dibentuknya Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP). KTP ini adalah jembatan akses informasi publik pada kinerja pemerintahan, sumber informasi tentang praktek pemerintahan, sehingga tidak ada praktek yang ditutup-tutupi oleh pejabat yang tidak bertanggungjawab, sehingga tidak terjadi *gap* informasi antara pemerintah dengan masyarakat misalnya mengenai salinan APBD saja begitu sulit untuk mendapatkan, padahal itu hak publik.

Kabupaten Lebak berdasarkan data Pemerintah Republik Indonesia yang dikeluarkan untuk bahan perhitungan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada tahun anggaran tahun 2005 adalah :

- Indeks Kemiskinan (*Poverty Gap*) : 1,80
- Indeks Kamahalan Konstruksi : 92,37
- Produk Domestik Regional Bruto : Rp. 1.243 triliun lebih
- PDRB per Kapita (BPS tahun 2004) : Rp. 3.641.249,00

Ketika dibandingkan dengan daerah otonom lain se-Banten, maka indeks kemiskinan dan PDB per Kapita Kabupaten Lebak merupakan yang terrendah, sedangkan indeks kemahalan konstruksi merupakan yang Tertinggi se-Provinsi Banten. Dan secara nasional Kabupaten Lebak dalam statistik daerah tertinggal adalah nomor 199 se-Indonesia. Terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak untuk mendukung iklim investasi dan dunia usaha pada tanggal 31 Desember 2004 melalui Keputusan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak yang kemudian teruskan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2005, tanggal 28 Juni 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak dimana Perda ini mengamanatkan KPPT sudah bisa operasional melayani masyarakat paling lambat 6 bulan setelah Perda ditetapkan. Sehingga KPPT pun efektif operasionalisasinya per 1 Januari 2006 dengan beban target APBD sebesar Rp. 1.668.965.000,00.

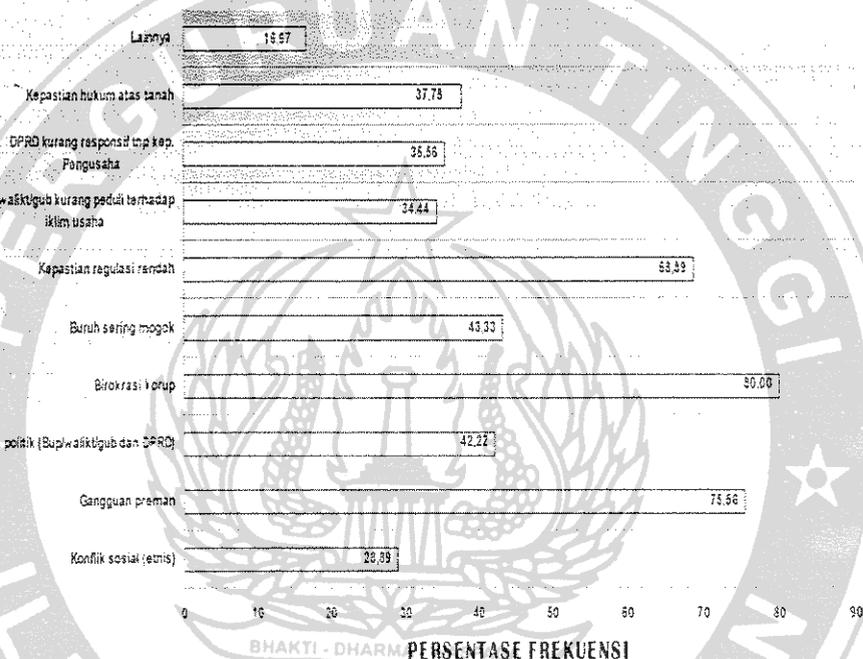
Langkah ini adalah langkah reformasi birokrasi pelayanan yang sangat strategis untuk dilaksanakan, dan hasil yang telah dicapai sampai saat ini sungguh sangat fantastis, tidak kalah dengan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen yang memang guru dari KPPT Kabupaten Lebak, karena mereka sebelumnya magang dan terinspirasi dari KPT Kabupaten Sragen. Pemerintah Kabupaten Sragen adalah guru bagi Pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal Perijinan, namun Pemerintah Kabupaten Lebak adalah guru bagi Pemerintah Kabupaten Sragen dalam hal Partisipasi dan Transparansi, karena di Kabupaten Lebak sudah ada Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP). Ini adalah sebuah simbiosis mutualisme yang perlu dikembangkan lebih jauh untuk

prospek ke depan. Kompetisi yang dibangun adalah kompetisi sehat yang menguntungkan masyarakat, sehingga kerja sama antar pemerintah daerah sangat perlu sekali dilakukan dan tidak tergantung dari Pusat, karena memang itulah semangat dari otonomi daerah yang kita bangun. Perbedaan prinsipil antara Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen dengan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah pada bidang kerjanya, dimana KPT Kabupaten Sragen melayani semua bentuk Pelayanan, baik perijinan maupun non perijinan, sedangkan KPPT Kabupaten Lebak saat ini hanya melayani pelayanan di bidang perijinan.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak adalah untuk melayani penduduk sebesar 1.176.802 jiwa dengan luas wilayah 304.472 hektar dengan administrasi pemerintahan yang terdiri dari 23 kecamatan, 295 desa dan 5 kelurahan, dimana dari 300 desa/kelurahan ini 190 diantaranya adalah dikategorikan sebagai Desa Tertinggal/ Desa Miskin dengan 102.868 KK miskin atau sejumlah dengan 419.960 jiwa.

Dalam hal menciptakan iklim investasi selain kemudahan perijinan di level birokrasi dengan membentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu guna memangkas birokrasi yang ada Pemerintah Kabupaten Lebak juga melakukan perbaikan infrastruktur investasi, diantaranya perbaikan infrastruktur jalan, sehingga roda ekonomi bisa berjalan, kemudian perbaikan dalam hal manufaktur juga dilakukan. Kondisi iklim investasi di Provinsi Banten sangat dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya kepastian hukum atas tanah, birokrasi yang korup, *law enforcement*, *rule of law* dan gangguan preman. Dalam penelitian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Tahun 2006 menunjukkan bahwa kondisi kegagalan usaha di Provinsi Banten tergambar dalam gambar 3 berikut ini :

FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN USAHA DIPROV.BANTEN



Gambar. Penyebab Kegagalan Usaha di Provinsi Banten

Jelas sekali terlihat bahwa di Propinsi Banten penyebab utama kegagalan usaha adalah birokrasi yang korup yakni sebesar 80,00 %, kemudian penyebab terbesar kedua adalah pada tingginya gangguan preman sebesar 75,56 % dan ketiga adalah kepastian regulasi yang rendah sebesar 68,89 %. Hasil data kualitatifnya menunjukkan bahwa gangguan preman disini adalah lebih kepada gangguan preman yang terorganisir yakni Kaum Jawara. Bukti lain adalah dari laporan audit BPK untuk tahun anggaran 2004 terjadi penyimpangan sebesar

Rp.4.148.078.988,00 dan pada tahun anggaran 2005 lebih besar lagi yakni sebesar Rp. 86.257.304.420,17.

Dalam rangka mewujudkan *good local governance* di masing-masing daerah akan sangat berbeda-beda, tergantung pada *socio cultural* masyarakatnya. Misalnya daerah yang mengandalkan/berbasis sektor pertanian akan berbeda dengan daerah yang berbasis industrial, oleh karena itu penerapan sebuah model/konsep akan sangat multi dimensi sehingga menuntut penyesuaian-penyesuaian yang cukup signifikan.

### Tantangan

Beberapa tantangan yang kemungkinan dihadapi oleh eksekutif/pemerintah daerah atau pemerintah di daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* adalah :

- Kemampuan pemerintah daerah untuk membaca situasi dan kondisi sosial tertentu (*socio cultural*) akan sangat menentukan keberhasilan proses, termasuk dalam hal ini penerapan konsep *good governance* juga akan dipengaruhi oleh banyak hal.
- Kemampuan memahami hubungan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor formal dan informal dari pemerintah daerah dan seluruh *stakeholders* juga mempunyai andil yang besar.
- Kemampuan membentuk masyarakat yang partisipatif dalam segala proses pemerintahan sehingga ketepatan sasaran bisa tercapai, prinsip akuntabilitas dan transparansi pun bisa berjalan.
- Kemampuan aparatur penyelenggara (SDM) pemerintahan yang harus ditingkatkan, sehingga mampu menghadapi tantangan yang lebih kompleks.
- Political will* dari pimpinan akan sangat signifikan dalam menentukan arah kebijakan ke level bawahnya.
- Membangun *continous improvement* dari semua stakeholders, sehingga perbaikan berkelanjutan dalam hal mengarahkan tata pemerintahan yang lebih baik, lebih berwibawa, lebih transparan.
- Kemampuan menyerap aspirasi, apa yang menjadi harapan dan kemauan publik, sehingga sebuah kebijakan akan didukung semua pihak bukan menjadi hal yang dipertentangkan.

## Strategi

Dalam menghadapi tantangan yang ada, pemerintah daerah dapat menerapkan beberapa strategi diantaranya adalah :

- Melakukan kerjasama antar pemerintah daerah, bisa berwujud studi banding, magang atau bentuk lainnya.
- Melakukan inovasi, terobosan yang efektif.
- Memperbaharui sistem yang telah ada, guna menerapkan prinsip-prinsip *good governance* secara lebih komprehensif.
- Kerjasama dengan seluruh *stakeholders*, seperti *civil society* dan perguruan tinggi
- Law enforcement*, penegakan hukum harus dilakukan termasuk didalamnya kepastian regulasinya (*rule of law*)
- Membangun akuntabilitas publik
- Kejelasan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang lebih aplikatif, sehingga jelas apa yang bisa dikerjakan daerah dan apa yang dikerjakan oleh pusat.
- Membentuk iklim usaha yang efektif, bisa dengan memberikan kemudahan perijinan, pemberian insentif bagi kalangan dunia usaha, penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dan manufakturnya.
- Reformasi birokrasi, dengan merestrukturisasi birokrasi agar lebih profesional agar pelayanan prima bisa tercapai, sehingga transparansi di semua level birokrasi bisa berjalan dan efektif.

Dengan semua ini diharapkan *good governance*, tata pemerintahan yang baik di Indonesia bisa tercapai dimana transparansi, akuntabilitas dan *law enforcement* menjadi salah satu tolok ukurnya. Minimal *good local governance* akan lebih banyak tercapai di banyak tempat, hingga pada akhirnya *good governance* bisa tercapai pada level nasional.

**Daftar Bacaan:**

Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2006. Hasil Pemeriksaan Semester II T.A. 2005 atas Belanja Daerah T.A. 2004 dan 2005 pada Provinsi Banten di Serang.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. 2006. *Pelayanan Perijinan Terpadu*. Pemkab Lebak.

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. 2006. *Pedoman Penelitian Governance Assessment*. Yogyakarta: PSKK dan Partnership.

RPJMN 2004-2009, 2005. Sinar Grafika. Jakarta

